

**RAPAT TEKNIS PENGISIAN E-DATA BASE
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
ACEH TAMIANG**

17 OKTOBER 2018

OUTLINE



I. LANDASAN HUKUM (1) (UU 23 Tahun 2014)

Pasal 274 :

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Mengacu pada pasal 274, maka SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Interpretasi



Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD

LANDASAN HUKUM...(2) (UU 23 Tahun 2014)

Pasal 391:

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. informasi keuangan Daerah.
- 2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem Informasi Pemerintahan Daerah

LANDASAN HUKUM.....(3) (UU 23 Tahun 2014)

Pasal 392:

Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pemebangunan Daerah yang mencakup :

- a. Kondisi geografis Daerah;
- b. Demografi;
- c. Potensi sumber daya daerah;
- d. Ekonomi dan keuangan daerah;
- e. Aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. Aspek pelayanan umum;
- g. Aspek daya saing daerah.

Pasal 393:

Informasi keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

LANDASAN HUKUM... (4)

(UU 23 Tahun 2014)

Pasal 394:

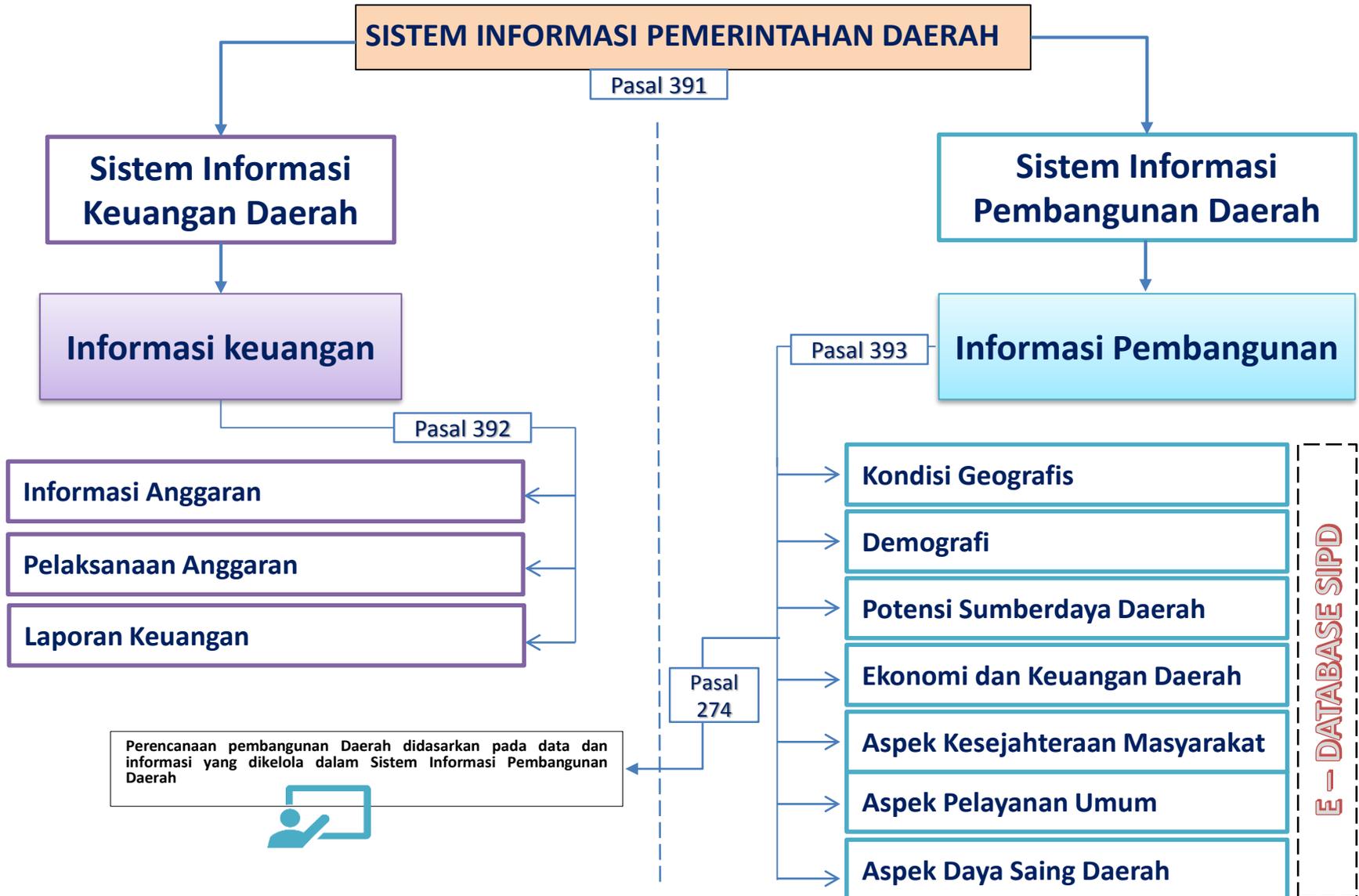
- 1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) **wajib diumumkan** kepada masyarakat.
- 2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah **wajib disampaikan** kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai **sanksi administratif** berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- 4) Dalam hal sanksi **teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan**, kepala daerah **dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

LANDASAN HUKUM.... (5) (UU 23 Tahun 2014)

Pasal 395:

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

LANDASAN HUKUM... (6) (UU 23 Tahun 2014)



2. ELEMEN DATA PADA E-DATABASE SIPD

3 Kelompok Data :

- Urusan Wajib
- Urusan Pilihan
- Data Umum

33 Jenis data :

- 32 jenis data urusan pemerintahan
- 1 jenis data umum

8 Header Data*
538 Variabel Data*
1.470 Elemen Data*
1.182 Sub Elemen Data*
203 Sub Sub Elemen Data*
14 Sub Sub Sub Elemen Data*

TOTAL : 3.415

Elemen Database...(1)

No	Urusan	Kelompok Data	Jenis Data	Header tanpa nilai	Header dengan Nilai	Variabel tanpa nilai	Variabel dengan Nilai	Elemen tanpa nilai	Elemen dengan Nilai	Sub Elemen tanpa nilai	Sub Elemen dengan Nilai	Sub Sub Elemen tanpa nilai	Sub Sub Elemen dengan Nilai	Sub Sub Elemen tanpa nilai	Sub Sub Elemen dengan Nilai	Total
1	PENDIDIKAN	Wajib	1	7	0	3	51	3	52	0	8	0	0	0	0	125
2	KESEHATAN	Wajib	1	3	0	7	10	0	61	0	18	0	5	0	0	105
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wajib	1	10	0	13	20	0	46	0	63	0	0	0	0	153
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Wajib	1	7	0	1	25	0	21	0	4	0	0	0	0	59
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	Wajib	1	3	0	9	8	1	57	0	57	0	5	0	0	141
6	SOSIAL	Wajib	1	12	0	5	59	15	67	0	60	0	0	0	0	219
7	TENAGA KERJA	Wajib	1	5	0	2	23	0	22	0	2	0	0	0	0	55
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Wajib	1	4	0	7	8	0	40	0	22	0	0	0	0	82
9	KETAHANAN PANGAN	Wajib	1	4	0	9	7	0	49	0	0	0	0	0	0	70
10	PERTAHANAN	Wajib	1	5	0	0	23	0	6	0	0	0	0	0	0	35
11	LINGKUNGAN HIDUP	Wajib	1	1	0	2	1	0	18	0	48	0	0	0	0	71
12	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENCATATAN SIPIL	Wajib	1	2	0	5	18	0	54	0	64	0	0	0	0	144
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Wajib	1	3	0	7	4	2	30	0	44	0	0	0	0	91
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Wajib	1	2	0	2	6	1	17	0	14	0	4	0	0	47
15	PERHUBUNGAN	Wajib	1	4	0	1	21	3	44	0	46	0	0	0	0	120
16	KOMINFORMATIKA	Wajib	1	4	0	7	3	2	14	0	14	0	0	0	0	45
17	UMKM	Wajib	1	2	1	7	9	0	49	0	16	0	0	0	0	85
18	PENANAMAN MODAL	Wajib	1	0	3	0	5	0	15	0	120	0	0	0	0	144
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Wajib	1	2	0	5	1	4	43	0	79	0	0	0	0	135
20	STATISTIK	Wajib	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	PERSANDIAN	Wajib	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	KEBUDAYAAN	Wajib	1	4	0	12	5	6	25	0	40	0	0	0	0	93
23	PERPUSTAKAAN	Wajib	1	1	0	1	10	0	45	0	59	0	0	0	0	117
24	KEARSIPAN	Wajib	1	1	0	9	0	2	23	0	4	0	4	0	0	44
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pilihan	1	3	0	0	30	0	72	0	59	0	0	0	0	165
26	PARIWISATA	Pilihan	1	9	2	15	40	0	41	0	30	0	0	0	0	138
27	PERTANIAN	Pilihan	1	5	0	7	29	0	90	0	65	0	0	0	0	197
28	KEHUTANAN	Pilihan	1	1	0	4	6	3	60	0	14	0	9	0	0	98
29	ESDM	Pilihan	1	4	0	1	38	4	115	0	94	0	98	0	0	355
30	PERDAGANGAN	Pilihan	1	3	0	0	11	0	50	0	9	0	0	0	0	74
31	PERINDUSTRIAN	Pilihan	1	3	2	0	44	0	158	0	36	0	0	0	0	244
32	TRANSMIGRASI	Pilihan	1	4	0	0	18	2	59	0	32	0	0	0	0	116
33	DATA UMUM	Umum	1	2	0	9	5	5	27	7	61	0	78	0	14	209
3778																
TOTAL		3	33	128		688		1523		1189		203		14		3781
				120	8	150	538	53	1470	7	1182	0	203	0	14	3745
					8		538		1470		1182		203		14	3415

Ket : Urusan yg memiliki turunan Kecamatan
 Urusan yg tidak memiliki turunan Kecamatan

Total Data dari Header s.d. Sub Sub Sub Elemen Data (yang memiliki Input)

Elemen database....(3)

Contoh Format Elemen Data Urusan Pertanian

Tanaman Pangan *
1. Luas Lahan Pertanian **(Ha)
1). Lahan sawah (Ha)
1. Beririgasi (Ha)
1. Tadah hujan (Ha)
2). Lahan kering (Ha)
2. Tegal/kebun (Ha)
2. Ladang/huma (Ha)
2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
1). Jumlah Produksi Padi (Ton)
2). Jumlah Produksi Jagung (Ton)
3). Jumlah Produksi Kedelai (Ton)
4). Jumlah Produksi Ubi (Ton)
5). Jumlah Produksi Tanaman Pangan lainnya (Ton)
3. Nilai Produksi Tanaman Pangan (Rp)
1). Nilai Produksi Padi (Rp)
2). Nilai Produksi Jagung (Rp)
3). Nilai Produksi Kedelai (Rp)
4). Nilai Produksi Ubi (Rp)
5). Nilai Produksi Tanaman Pangan lainnya (Rp)
4. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (%)

Hortikultura *
1. Luas Areal Holtikultura (Ha)**
1). Luas Areal Buah
2). Luas Areal Sayuran
3). Luas Areal Bahan Obat Nabati
4). Luas Areal Florikultura
2. Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)**
1). Jumlah Produksi Buah
2). Jumlah Produksi Sayuran
3). Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati
4). Jumlah Produksi Florikultura
3. Nilai produksi Hortikultura (Rp)**
1). Nilai produksi Buah (Rp)
2). Nilai produksi Sayuran (Rp)
3). Nilai produksi Bahan Obat Nabati (Rp)
4). Nilai produksi Florikultura (Rp)

3. APLIKASI E-DATABASE SIPD ONLINE

1. Desain Tampilan

Desain tampilan SIPD sudah menggunakan teknologi *responsive web design* untuk mendukung kebutuhan akses dari *mobile device*.

2. Pembatasan Otoritas Akses

Hampir semua halaman di batasi akses, terdapat 4 pilihan menu SIPD (e-Database, e-Planning, e-Budgeting dan e-Money).

3. Manajemen User

User di bagi menjadi 5 level diantaranya : Admin Pusat, Admin Provinsi, Admin Kab/Kota, SUPD, dan Agen Data SKPD (Propinsi dan Kab/Kota).

4. Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data, dilengkapi dengan sistem validasi data, jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9, koma (,) , n/a, karakter untuk menginput batas geografis dan tanda minus (-).

APLIKASI E-DATABASE SIPD ONLINE(2) TAMPILAN APLIKASI SIPD ONLINE

1. Dashboard (<https://sipd.kemendagri.go.id>)

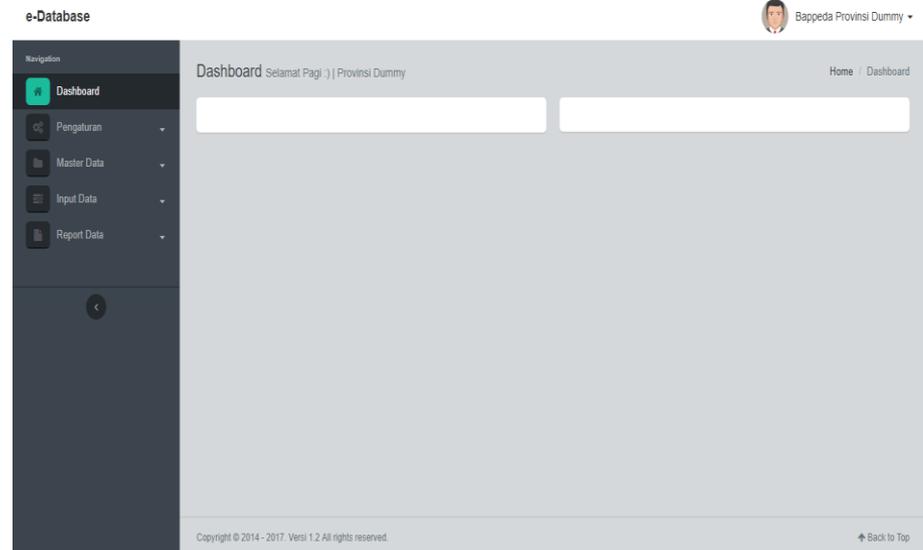


Dashboard :

- 1.E-Database
- 2.E-Planning
- 3.E-Budgeting
- 4.E-Monev

Menu :

- 1.Pengaturan
- 2.Master Data
- 3.Input Data
- 4.Report Data



2. Pengaturan

e-Database Bappeda Provinsi Dummy ▾

Navigation

- Dashboard
- Pengaturan
- Master Data
- Input Data
- Report Data

Pengguna Data

Home Pengguna

Pengguna

Pencarian Data Cari Data

No	Username	Password	Nama Dinas	Penanggung Jawab	Level	Blokir	Aksi
1	kelautan_jatim		kelautan		Operator PD	N	✎ ✖
2	kab_dummy		Bappeda Kabupaten Dummy Provinsi Dummy	No Name A Bappeda Kabupaten	Admin Kabupaten/Kota	N	✎ ✖
3	kot_dummy		Bappeda Kota Dummy Provinsi Dummy	No Name Bappeda Kota	Admin Kabupaten/Kota	N	✎ ✖
4	pend_prov_dummy		Dinas Pendidikan Provinsi Dummy	No Name Dinas Pendidikan	Operator PD	N	✎ ✖
5	dinkes_jatim		Dinas Kesehatan Prov Jatim	Dr. Ir. Arief Yatiya, M.Sc	Operator PD	N	✎ ✖
6	dinasProvDummy		Dinas Sosial Provinsi Dummy	M. NoName	Operator PD	N	✎ ✖

Total 6 Hal | First Prev 1 Next Last Tambah

3. Master Data

e-Database Bappeda Provinsi Dummy ▾

Navigation

- Dashboard
- Pengaturan ▾
- Master Data ▾
- Input Data ▾
- Report Data ▾

Sumber Data Home / Sumber Data

Sumber Data 🔍 🔄 ⌵

Pencarian Data **Cari Data**

No	Sumber Data	Alamat	No. Telp	Aksi
1	Dinas Pendidikan Provinsi Dummy	Jalan Kesehatan	987654	 

Total 1 Hal : [First](#) [Prev](#) 1 [Next](#) [Last](#) **Tambah**

Copyright © 2014 - 2017. Versi 1.2 All rights reserved. ↑ Back to Top

4. Input Data

e-Database



Bappeda Provinsi Dummy ▾

Navigation

Dashboard

Pengaturan ▾

Master Data ▾

Input Data ▾

Report Data ▾



Data Urusan Wajib Data

Home / Input Data / Data Urusan Wajib

Data Urusan Wajib



PILIH DATA ▾

Tahun Data ▾

Tampilkan

PILIH DATA

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SOSIAL

TENAGA KERJA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PANGAN

5. Report Data

e-Database



Navigation

- Dashboard
- Pengaturan
- Master Data
- Input Data
- Report Data

Table Report Data

Home / Table Report

Table Report

Propinsi: **TesProvinsi**

Urusan: **PENDIDIKAN**

Tabel: **PENDUDUK BERDASARKAN USIA SEKOLAH**

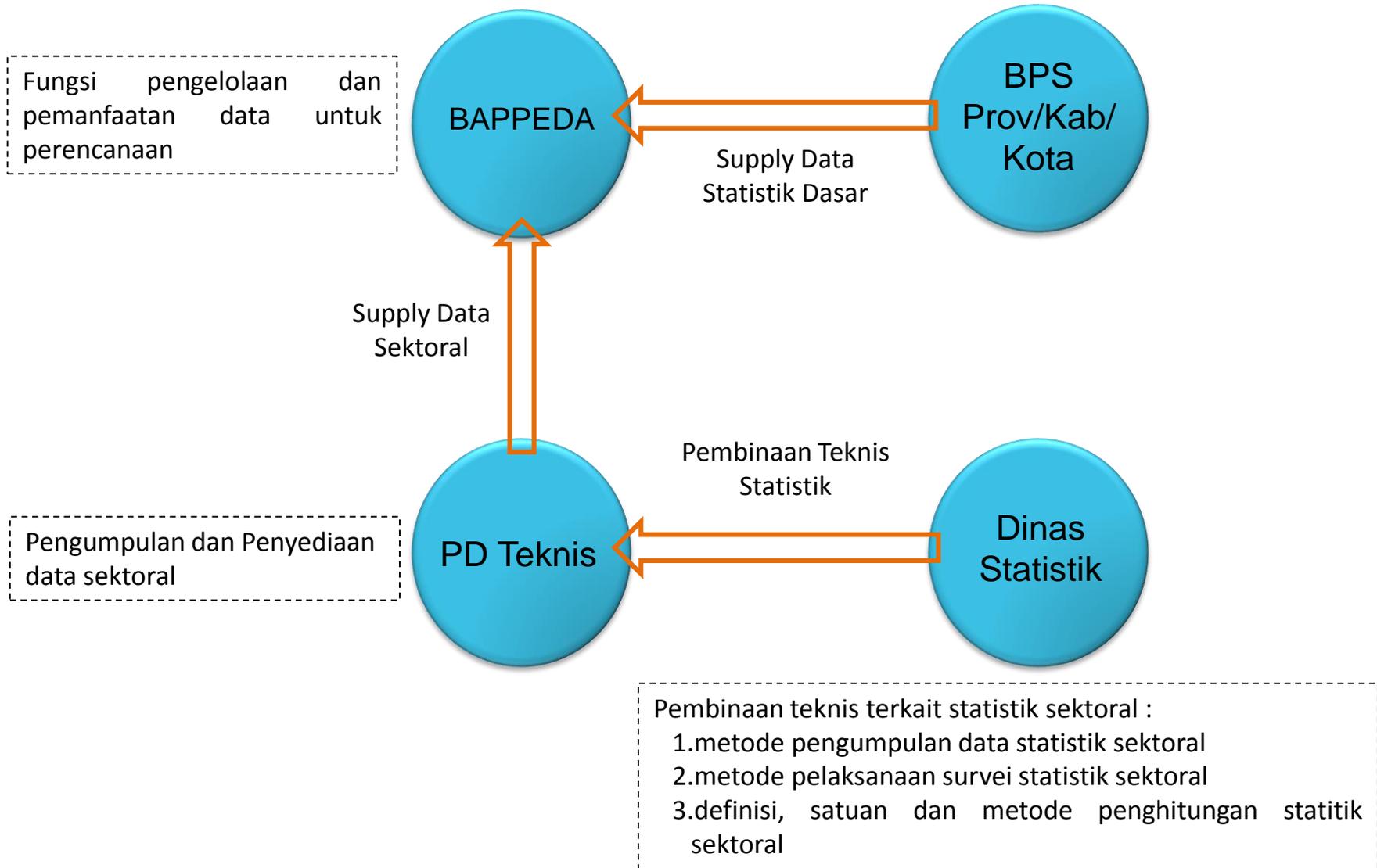
Tampilkan

- Semua Tabel
- PENDUDUK BERDASARKAN USIA SEKOLAH**
- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- SISWA, TENAGA PENDIDIK, DAN RATIO TENAGA PENDIDIK - SISWA
- PENGELOLA SEKOLAH
- KONDISI BANGUNAN SEKOLAH DAN RUANG KELAS
- ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN
- FASILITAS PENDIDIKAN SMP DAN SMA
- MURID PUTUS SEKOLAH
- PENDIDIKAN NON FORMAL
- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- PERGURUAN TINGGI/AKADEMI/SEDERAJAT

Copyright © 2014 - 2017. Versi 1.2 All rights reserved.

[Back to Top](#)

4. KELEMBAGAAN TERKAIT E-DATABASE SIPD



5. TINDAK LANJUT PENGISIAN E-DATABASE SIPD

1. SKPK :

- a. Mengidentifikasi elemen data sesuai dengan kewenangan masing-masing SKPK.**
- b. Mengumpulkan dan mengisi elemen data sesuai dengan hasil identifikasi.**
- c. Mengembalikan hasil isian kepada Bappeda.**

2. Bappeda :

- a. Menginput hasil isian SKPK ke dalam SIPD online berdasarkan masing-masing akun bidang urusan (selanjutnya akan dilakukan oleh SKPK)**
- b. Memverifikasi/Mengevaluasi Keterisian Data**
- b. Mencetak Laporan**

Sekian
dan
Terimakasih

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ
مِّنَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ